

## STRATEGI PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN WILAYAH DI KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

**Syamsidar\***

Email: [syamsidar.lani@gmail.com](mailto:syamsidar.lani@gmail.com)

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kota Makassar

**Ria Wikantari**

Email: [rwikantaria@gmail.com](mailto:rwikantaria@gmail.com)

Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin  
Jalan Poros Malino Km. 6, Bontomarannu, Kabupaten Gowa

**Arifuddin Akil**

Email: [arifuddin@unhas.ac.id](mailto:arifuddin@unhas.ac.id)

Departemen Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin  
Jalan Poros Malino Km. 6, Bontomarannu, Kabupaten Gowa

### ABSTRAK

Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu pembangunan kawasan permukiman, jaringan infrastruktur, sarana ekonomi maupun sarana sosial. Meningkatnya kegiatan pembangunan tentunya juga terkait dengan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Kecamatan Barru merupakan ibukota kabupaten Barru yang mengalami perkembangan di seluruh bagian wilayah, baik dari segi fisik, sosial, serta ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman serta strategi pengendalian kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah di kecamatan Barru. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menentukan bobot prioritas kepentingan masing-masing kriteria dari variabel yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman dan analisis FFA (*Force Field Analysis*) untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi merupakan factor yang paling berpengaruh dalam perkembangan permukiman disusul oleh kondisi infrastruktur permukiman. Strategi yang diprioritaskan dalam mengendalikan perkembangan permukiman yaitu pengendalian kondisi sosial dengan membentuk karakter masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dan penguatan masyarakat serta pemenuhan ketersediaan ruang publik sesuai kebutuhan skala pelayanan.

**Kata Kunci:** Pengendalian, Permukiman, Perkembangan Wilayah

### ABSTRACT

Population growth has led to an increase in development activities in various regions to meet the needs of the community, be it the construction of residential areas, infrastructure networks, economic facilities and social facilities. The increase in development activities is of course also related to the space needed to carry out these development activities. Barru District is the capital of Barru district which is experiencing development in all parts of the region, both in terms of physical, social and economic. The purpose of this study is to determine the factors that influence the development of settlements as well as strategies for controlling settlement areas in supporting regional development in the Barru sub-district. The method used in this study namely *Analytical Hierarchy Process* (AHP) is used to determine the importance priority weight of each criterion of the variables that affect settlement growth and FFA analysis (*Force Field Analysis*) to identify various obstacles in achieving a goal. This study shows that economic conditions are the most influential factor in settlement development, followed by settlement infrastructure conditions. The prioritized strategy in controlling settlement development is controlling social conditions by building community character by increasing community participation and strengthening as well as fulfilling the availability of public space according to the needs of the service scale.

**Keyword:** Control, Settlement, Regional Development

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial agar berkembang dengan baik dan terpeliharanya kelangsungan kehidupan melalui perlindungan dan keseimbangan lingkungan hidup baik di dalam maupun antar wilayah. (Rachman, 2010). Menurut Hairuddin (2008), pembangunan pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan, artinya pembangunan wilayah dapat menimbulkan pertumbuhan baik fisik ataupun non fisik. Dengan kata lain, pertumbuhan dapat berupa perkembangan/difusi atau peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau komunitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (2011) dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kawasan permukiman adalah bagian lingkungan di luar kawasan lindung, yaitu berupa kawasan perkotaan atau perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hidup dan sebagai tempat kegiatan yang mendukung penghidupan. Ayat 5 menjelaskan bahwa permukiman adalah suatu kawasan yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, dengan prasarana, sarana, utilitas, dan sumber daya pendukung lainnya di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Barru telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kurun waktu 2011-2031. Selama tahun 2011 hingga dengan tahun 2020, Kabupaten Barru telah mengalami kepesatan perkembangan wilayah sangat dinamis. Fungsi dan peran Kabupaten Barru dalam sistem perkotaan nasional yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga peranan kawasan ini dalam perekonomian antar wilayah dan nasional cukup besar.

Perkembangan fisik Kabupaten Barru terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi penduduk begitu pula di wilayah kecamatan Barru. Salah satu perkembangan fisik yang mendorong perkembangan di kecamatan Barru yaitu ditetapkannya sebagai kawasan strategis wilayah provinsi yang berpotensi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Kawasan emas strategis tersebut merupakan bukti implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Barru yang seluruhnya berada di Kecamatan Barru, yang merupakan ibukota kabupaten. Pembangunan daerah harus mampu mempengaruhi dan memajukan

pembangunan di dalam dan di luar daerah. Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Barru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Barru Garongkong Tahun 2014-2034. Namun dengan adanya pembangunan di kawasan tersebut telah mengundang migrasi dan penambahan penduduk yang cukup tinggi, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan lahan di kawasan tersebut.

Kecamatan Barru merupakan ibukota kabupaten dengan perkembangan yang terjadi di hampir seluruh bagian wilayahnya. Dalam hal ini pembangunan kecamatan Barru yang dimaksud adalah pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. Salah satu indikator perkembangan kecamatan Barru dapat dilihat dari segi sosial yaitu jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, pada tahun 2017, jumlah penduduk yaitu 41.078 jiwa dan selama periode 4 tahun meningkat sebesar 2.897 jiwa ditahun 2020 sejumlah 43.975 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk di kecamatan Barru, kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Kebutuhan ruang ini tidak hanya sebagai perluasan pemukiman namun juga bertujuan untuk aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini berakibat adanya perubahan lahan dari tak terbangun menjadi lahan yang terbangun.

Penelitian terkait pengendalian kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Siahaan, dkk. (2014) menganalisis tentang konversi lahan pertanian ke lahan perumahan/pemukiman dan kesesuaiannya terhadap RTRW dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Karundeng, dkk. (2015) melakukan penelitian tentang pengembangan permukiman yang direncanakan serta melakukan kajian tentang pengaruh yang dapat timbul dari pengembangan wilayah. Menurut Farizkha (2016), perkembangan permukiman di wilayah yang berkembang pesat disebabkan oleh efek aglomerasi yang menyebabkan kesenjangan kondisi permukiman. Maka dari itu diperlukan penyelesaian bagi masalah pembangunan permukiman yang tidak dapat dikendalikan. Hasil yang diharapkan yaitu berupa konsep dan rumusan strategi yang menjadi instrumen pengendalian. Sedangkan menurut Pigawati, dkk. (2017), permukiman di Kota Semarang berkembang sangat cepat dan sebagian besar tidak terkendali. Bertambahnya kawasan terbangun, khususnya kawasan permukiman, mengindikasikan adanya penurunan ruang hijau dan daerah resapan air. Penelitian tersebut merupakan analisa perkembangan permukiman di suatu wilayah dan bagaimana penentuan arah kebijakannya.

Metode yang digunakan secara umum pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, untuk menganalisa pengaruh pembangunan perumahan terhadap pengembangan wilayah menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman menggunakan teknik analisa Analytical Hierarchy Process (AHP).

Hal terbaru dalam penelitian ini yaitu bagaimana menentukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan permukiman dengan menggunakan teknik analisa AHP serta merumuskan strategi dengan menggunakan Analisis Medan Daya (Force Field Analysis /FFA).

Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan permukiman di kecamatan Barru serta merumuskan strategi pengendalian kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah kecamatan Barru.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Kabupaten Barru dengan fokus lokasi di Kec. Barru yang merupakan daerah ibukota kabupaten dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi diantara wilayah lainnya di kabupaten Barru.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan agar dapat diketahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih namun tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2009). Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

### **Teknik Analisa**

Dalam pencapaian tujuan pertama, tahapan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan kawasan permukiman dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP adalah model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Model pendukung keputusan ini menguraikan masalah yang kompleks, multi-faktor atau multi-kriteria menjadi sebuah hierarki, yang didefinisikan sebagai representasi dari masalah berlapis-lapis dalam struktur multi-level. , dimana level pertama adalah objektif, diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dst, hingga level terakhir alternatif. (Permana, Suprayogi, & Prasetyo, 2017).

Tahap-tahap dalam teknik analisa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan Marimin (2004) adalah:

1. Penyusunan Hierarki
2. Penyebaran kuisisioner
3. Pengolahan dengan Matriks Berpasangan (*Pairwise Comparisons*)
4. Perbandingan untuk memperoleh prioritas (Uji Normalisasi)
5. Uji Konsistensi

Pada tahap penyusunan hirarki, terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan. Identifikasi masalah ini berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu mengendalikan perkembangan permukiman. Pada permasalahan yang dihadapi dijelaskan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap upaya pengendalian perkembangan permukiman. Berdasarkan kajian teori, variabel yang digunakan dalam menentukan faktor pertumbuhan permukiman yang menjadi dasar dari penelitian, dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tinjauan Literatur

Sumber	Aspek Tinjauan Literatur	Aspek tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian
Catanesse dalam Rachman, (2010)	Unsur pokok pertumbuhan wilayah: - Dinamika ekonomi - Dinamika politik atau sistem pengelolaan - Dinamika budaya	Faktor pertumbuhan permukiman dapat dilihat dari: - Aspek fisik - Aspek non fisik
Undang-undang Nomor 1 tahun 2011	Definisi permukiman: Kumpulan rumah, sarana dan prasarana, utilitas umum	Aspek fisik meliputi : - kondisi Alam - kondisi Perumahan - kondisi Jaringan (Infrastruktur dan sarana permukiman)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemilihan lokasi permukiman: Aspek fisik 1. Kondisi kekumuhan - Bangunan gedung - Jalan - Air minum - Drainase - Pengelolaan air limbah - Persampahan - Proteksi kebakaran 2. Legalitas tanah - Status penguasaan tanah - Kesesuaian dengan rencana tata ruang	Aspek Non - fisik meliputi : - Kondisi sosial - Kondisi ekonomi - kondisi budaya

---

	Aspek non fisik
	1. Nilai strategis lokasi
	2. Kependudukan
	3. Kondisi sosial, ekonomi, budaya
Doxiadis, 1970	Elemen pembentuk permukiman : - Alam - Manusia - Masyarakat - Rumah/perumahan - Jaringan

---

Dalam merumuskan strategi dan arahan pengembangan permukiman Kabupaten Barru, maka digunakan *Force Field Analysis* (FFA). FFA merupakan alat yang dipergunakan untuk menyusun strategi kekuatan yang mendukung dan menghambat suatu keputusan (Murdock Hernan, 2018). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis FFA yaitu sebagai berikut (Aliyah, 2003):

1. Melakukan identifikasi permasalahan dari kejadian yang terjadi
2. Melakukan analisis permasalahan yaitu dengan identifikasi kekuatan pendorong (*driving force*) dan kekuatan penghambat (*restraining force*).
3. Menyampaikan list faktor pendorong maupun faktor penghambat kepada responden yang merupakan perwakilan instansi pengambil kebijakan.
4. Meminta responden untuk memberikan penilaian dengan bobot tiap faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai target.
5. Bobot faktor pendorong dievaluasi dalam skala dengan mengukur seberapa kuat faktor tersebut dalam mencapai tujuan dan seberapa mudah untuk mengelolanya.
6. Bobot faktor penghambat dievaluasi dalam skala dengan mengukur seberapa kuat faktor tersebut dalam mencapai tujuan dan seberapa mudah untuk menyelesaikannya.
7. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan terkait penelitian di Kecamatan Barru

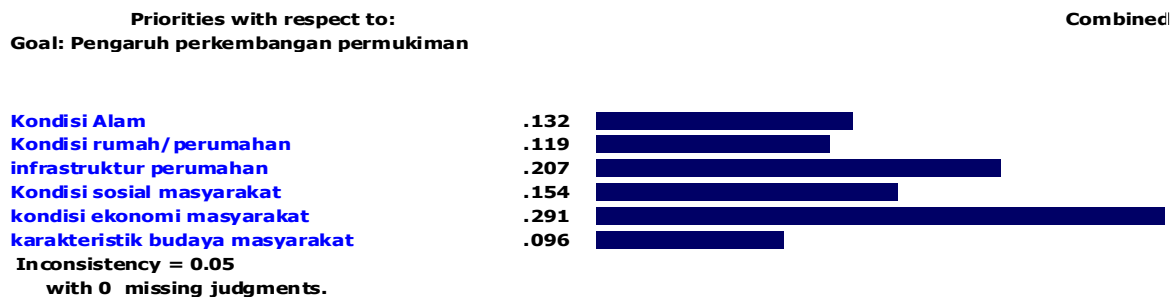
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analytical Hierarchy Process (AHP)

Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan permukiman diperoleh dari hasil AHP berdasarkan variabel observasi yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner AHP terhadap responden yang ditunjuk, kemudian diolah

menggunakan aplikasi Expert choice 11 yang merupakan aplikasi yang digunakan sebagai salah satu alat untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan keputusan, dalam hal ini penentuan hasil dalam AHP. Variabel yang diamati ini adalah unsur yang membentuk permukiman dan disusun agar tersusun hierarki untuk menentukan tingkat pengaruh antar variabel.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa proses perkembangan permukiman di seluruh wilayah studi disebabkan oleh pengaruh kondisi ekonomi masyarakat dengan bobot 0,291 atau 29%, diikuti oleh keadaan infrastruktur perumahan dengan bobot 0,207 atau 21% dan kondisi sosial dengan bobot 0,154 atau 15%, dengan skor inkonsistensi sebesar 0,05 dimana  $\leq 0,1$  maka variabel tersebut dianggap valid dan dapat digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman. Hasil pengaruh variabel terhadap seluruh responden yang menggambarkan keadaan seluruh daerah penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Nilai Output AHP semua fariabel

Tabel 2. Nilai perhitungan AHP semua fariabel

No	Faktor/variabel	Nilai	Persentase
1	Kondisi alam	0.132	13%
2	Kondisi perumahan	0.119	12%
3	Kondisi infrastruktur perumahan	0.207	21%
4	Kondisi sosial	0.154	15%
5	Kondisi ekonomi	0.291	29%
6	Kondisi budaya	0.096	10%

Berdasarkan variabel yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi tiap-tiap variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan permukiman secara keseluruhan. Kondisi tersebut secara detail dipaparkan pada tabel 3.

Tabel 3. Kondisi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman di wilayah penelitian

No	Faktor/variabel	Kondisi faktor/variabel pada wilayah penelitian	Tingkat pengaruh
1	Kondisi ekonomi	1. Penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di kec. Barru 2. Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman adalah jasa, disusul pertanian dan manufaktur. Kegiatan ini berpotensi mengarah pada pertumbuhan pemukiman baru.	1
2	Kondisi infrastruktur perumahan	1. Jaringan PDAM terbangun dan merata di wilayah penelitian. Tercatat sekitar 46% pengguna PDAM di kabupaten Barru berada di kecamatan Barru 2. Hampir seluruh rumah tangga di wilayah penelitian terlayani PLN dengan baik. Meski ada sebagian rumah tangga menggunakan listrik non PLN atau non listrik tapi persentasenya sangat kecil yaitu 2% 3. Perkembangan permukiman di wilayah studi berjalan seiring dengan terbentuknya pola linier. Pembangunan permukiman berlangsung di sepanjang jalan arteri yang menghubungkan kabupaten maupun daerah lain di sekitar wilayah Kecamatan Barru	2
3	Kondisi sosial	1. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan akan tempat tinggal. Berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk, terlihat bahwa Kecamatan Barru meningkat tiap tahunnya.	3
4	Kondisi alam	1. Perkembangan permukiman memungkinkan untuk terjadi di hampir semua wilayah studi. 2. Beberapa titik di wilayah penelitian terindikasi rawan banjir dan longsor di daerah permukiman tumbuh. 3. Alih fungsi lahan merupakan pengaruh yang memungkinkan terjadi akibat kondisi alam	4
5	Kondisi perumahan	Wilayah dengan kepadatan tinggi, dan memiliki fasilitas perumahan yang baik adalah kelurahan Sumpang Binangae yang merupakan ibukota kecamatan. Semakin jauh keluar wilayah tersebut, semakin rendah kepadatan dan kelengkapan fasilitas serta persebarannya.	5
6	Karakter budaya	1. Secara umum pertumbuhan permukiman di	6

masyarakat	wilayah penelitian tidak menunjukkan ciri identitas budaya tertentu. Pemukiman tumbuh melalui simpul-simpul fungsional berdasarkan karakteristik kecamatan dan keberadaan jalan.
	2. Kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan keluarga dan keengganan masyarakat untuk meninggalkan desa merupakan aktivitas yang dipengaruhi oleh kondisi budaya.

**Force Field Analysis (FFA)**

Peningkatan luas lahan permukiman tiap tahunnya di wilayah penelitian mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami perkembangan penduduk sehingga mempengaruhi berbagai faktor atau variabel yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam mendukung perkembangan di wilayah penelitian, pertumbuhan permukiman perlu dikendalikan, untuk itu dirumuskan strategi dalam pengendalian perkembangan permukiman dengan mengidentifikasi terlebih dahulu yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**

Faktor pendorong pengendalian kawasan permukiman diperoleh dari variabel pertumbuhan permukiman yang memperoleh bobot tinggi sedangkan faktor penghambat diperoleh dari variabel pertumbuhan permukiman yang sedang maupun rendah. Penjabaran faktor pendorong dan faktor penghambat secara detail dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Faktor pendorong dan faktor penghambat

No	Faktor Pendorong	No	Faktor Penghambat
1	Kondisi ekonomi: kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan potensi yang baik bagi pertumbuhan permukiman	1	Kondisi alam: akibat dari kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya kawasan permukiman adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali
2	Kondisi infrastruktur permukiman: infrastruktur permukiman hampir seluruhnya terpenuhi dengan baik	2	Kondisi perumahan: Kesenjangan kondisi permukiman terbangun dan kurang meratanya fasilitas antara wilayah permukiman perkotaan dan pedesaan.
3	Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya berdampak positif bagi perkembangan permukiman	3	Kondisi budaya: kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan keluarga dan keengganan masyarakat untuk meninggalkan desa

**Prioritas Perencanaan**

Faktor pendorong dan faktor penghambat kemudian diberi bobot nilai oleh para pengambil keputusan (stakeholder) di wilayah penelitian. Fokusnya adalah menentukan strategi perencanaan dalam pengendalian perkembangan permukiman. Prinsip dasar analisis medan daya (*force field analysis*) ketika menentukan prioritas perencanaan adalah untuk meningkatkan kekuatan faktor pendorong dan mengurangi faktor penghambat. Berdasarkan prinsip ini, penentuan faktor yang diprioritaskan yaitu faktor kekuatan pendorong dan tingkat kendali yang mempunyai kekuatan relatif 4 akan dipertahankan, sedangkan faktor yang memiliki nilai kekuatan relatif di bawah 4 akan diprioritaskan untuk memperoleh penanganan. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan faktor penghambat dan tingkat kemudahan pengendalian, yang memiliki nilai kekuatan relatif tertinggi lebih diprioritaskan daripada yang memiliki kekuatan relatif lebih rendah. Berdasarkan prinsip dasar analisis medan gaya, prioritas perencanaan dalam menyusun strategi pengendalian perkembangan permukiman seperti yang jabarkan pada tabel 5.

Tabel 5. Prioritas perencanaan strategi pengendalian perkembangan permukiman

No.	Faktor Pendorong	KR	Prioritas	No	Faktor Penghambat	KR	Prioritas
1.	Kondisi ekonomi: kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan potensi yang baik bagi pertumbuhan permukiman	4.125	II	1.	Kondisi alam: akibat dari kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya kawasan pemukiman adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali	4	II
2.	Kondisi infrastruktur permukiman: infrastruktur permukiman hampir seluruhnya terpenuhi dengan baik	4.375	III	2.	Kondisi perumahan: Kesenjangan kondisi permukiman terbangun dan kurang meratanya fasilitas antara wilayah permukiman	4.125	I

					perkotaan dan pedesaan.
3.	Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya berdampak positif bagi perkembangan permukiman	3.625	I	3.	Kondisi budaya: kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan keluarga dan keengganan masyarakat untuk meninggalkan desa
					3.625 III

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kondisi infrastruktur permukiman memperoleh penilaian kekuatan relatif tertinggi sebesar 4.375. Berdasarkan skala penilaian kekuatan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan, nilai 4,375 berarti bahwa indikator ini memiliki pengaruh sangat kuat dalam mendorong pengendalian perkembangan permukiman. Sedangkan skala penilaian kemudahan mengendalikan faktor pendorong nilai 4 merupakan indikator yang sebagian besar di bawah kendali. Faktor kondisi sosial masyarakat merupakan faktor yang memperoleh penilaian kekuatan relatif terendah 3,625 yang berarti bahwa komponen ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam mendorong pengendalian perkembangan permukiman dan dengan bobot 3 berarti sebagian di bawah kendali dalam hal kemudahan mengendalikan kondisi sosial masyarakat.

Pada sisi factor penghambat, kondisi rumah/perumahan memperoleh penilaian kekuatan relatif tertinggi sebesar 4.125. Berdasarkan skala penilaian kekuatan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan, nilai 4.125 berarti bahwa indikator ini memiliki pengaruh kuat dalam menghambat pengendalian perkembangan permukiman. Berdasarkan skala penilaian kemudahan mengendalikan faktor penghambat nilai 4 merupakan indikator yang mudah diselesaikan. Faktor kondisi social budaya masyarakat merupakan faktor yang memperoleh penilaian kekuatan relatif terendah 3,625 yang berarti bahwa faktor ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam menghambat pengendalian perkembangan permukiman namun cukup mudah diselesaikan.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong berupa kondisi sosial masyarakat menjadi prioritas yang harus dikuatkan. Sedangkan faktor penghambat berupa faktor kondisi rumah/perumahan menjadi prioritas permasalahan yang harus diselesaikan.

### Rumusan Strategi

Berdasarkan prioritas perencanaan yang telah ditetapkan, dirumuskan strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Strategi pengendalian perkembangan wilayah permukiman

Prioritas	Faktor Pendorong	Strategi
D1	Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya berdampak positif bagi perkembangan permukiman	Membentuk identitas masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan masyarakat serta pemenuhan ketersediaan ruang publik sesuai kebutuhan skala pelayanan.
D2	Kondisi ekonomi: kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan potensi yang baik bagi pertumbuhan permukiman	Menciptakan lapangan kerja berbasis industri rumah tangga untuk membentuk kemandirian masyarakat melalui pelatihan keterampilan, teknik pemasaran dan pengelolaan modal usaha.
D3	Kondisi infrastruktur permukiman: infrastruktur permukiman hampir seluruhnya terpenuhi dengan baik	Implementasi pemenuhan infrastruktur jaringan sesuai dengan kebutuhan dan cakupan layanan.
Prioritas	Faktor Penghambat	Strategi
H1	Kondisi perumahan: Kesenjangan kondisi permukiman terbangun dan kurang meratanya fasilitas antara wilayah permukiman perkotaan dan pedesaan.	Pengetatan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan tentang persyaratan pembangunan rumah. Izin mendirikan bangunan hanya dapat diberikan jika ketersediaan infrastruktur dasar dan prasyarat permbangunan rumah terpenuhi.
H2	Kondisi alam: akibat dari kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya kawasan pemukiman adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali	Strategi penataan ruang yaitu mempertegas zonasi peruntukan lahan permukiman, yang diperkuat oleh peraturan daerah untuk menindak pelanggaran (khususnya alih fungsi lahan )
H3	Kondisi budaya: kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan keluarga dan pembangunan rumah secara mandiri/swadaya tanpa perencanaan yang baik.	Pembinaan masyarakat terkait aktifitas bermukim dengan melakukan sosialisasi mengenai prasyarat permukiman yang baik

## **Pembahasan**

Dari hasil analisa FFA didapatkan prioritas strategi dalam mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah penelitian. Berikut adalah jabaran dari strategi yang telah disusun.

### **Pengendalian kondisi sosial**

Strategi yang perlu diterapkan dalam mengendalikan kondisi sosial yaitu membentuk karakter masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dan penguatan masyarakat serta pemenuhan ketersediaan ruang publik sesuai kebutuhan skala pelayanan. Pengaruh faktor kondisi sosial yang menjadi penyebab terjadi perkembangan permukiman adalah penambahan penduduk. Penambahan penduduk merupakan hasil dari adanya proses migrasi, yang meningkatkan permintaan akan hunian atau tempat tinggal. Membentuk identitas masyarakat bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan dan masyarakat (efek ke depan adalah mengurangi ketimpangan kondisi permukiman antara perkotaan dan pedesaan). Dengan diterapkannya strategi tersebut ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap wilayah permukiman yang ada, di mana fungsi dari rumah bukan hanya digunakan sebagai hunian, tetapi juga sebagai tempat berusaha.

### **Pengendalian kondisi ekonomi**

Strategi yang diperlukan dalam pengendalian kondisi ekonomi masyarakat yaitu menciptakan lapangan kerja berbasis industri rumah tangga untuk membentuk kemandirian masyarakat melalui pelatihan keterampilan, teknik pemasaran dan pengelolaan modal usaha. Perkembangan permukiman akibat kondisi ekonomi disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat dan kegiatan ekonomi atau jenis mata pencaharian. Keberadaan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan menjadi tarikan tersendiri bagi masyarakat di wilayah pedesaan sehingga menyebabkan tidak efisiennya penggunaan transportasi melihat jauhnya jarak antara rumah dan tempat bekerja penduduk. Dengan keberadaan kegiatan industri rumah tangga yang dilakukan masyarakat, maka aktivitas ke wilayah perkotaan terkendali dan tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat.

### **Pengendalian kondisi infrastruktur permukiman**

Strategi dalam pengendalian perkembangan permukiman terkait faktor kondisi infrastruktur permukiman yaitu implementasi pengadaan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan cakupan layanan. Infrastruktur yang paling berpengaruh pada wilayah

penelitian yaitu air bersih kemudian disusul listrik. Namun pada perkembangannya, infrastruktur jalan juga memiliki peran penting, wilayah kecamatan Barru di area perkotaan merupakan wilayah yang berada di sepanjang jalan utama penghubung antar kabupaten. Hal tersebut menjadikan tarikan masyarakat dan menjadi penyebab terjadinya pembangunan rumah sebagai tempat tinggal. Perkembangan permukiman terjadi beriringan dengan adanya infrastruktur. Oleh karena itu, akan jadi permasalahan jika kondisi dan ketersediaan dari infrastruktur tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

### **Pengendalian kondisi perumahan**

Strategi dalam mengendalikan perkembangan pemukiman terkait faktor kondisi perumahan yang akan dilakukan yaitu pengetatan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan tentang persyaratan pembangunan rumah. Izin mendirikan bangunan hanya dapat diberikan jika ketersediaan infrastruktur dasar dan prasyarat pembangunan rumah terpenuhi. Perkembangan permukiman yang terjadi karena faktor kondisi perumahan yaitu terkait aspek lokasi dan kelengkapan fasilitas perumahan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan wilayah dalam proses pembangunan permukiman di wilayah penelitian.

### **Pengendalian kondisi alam**

Strategi yang perlu dilakukan dalam pengendalian kondisi alam yaitu strategi penataan ruang yaitu mempertegas zonasi peruntukan lahan permukiman, yang diperkuat oleh peraturan daerah untuk menindak pelanggaran (khususnya alih fungsi lahan). Pemanfaatan alam untuk pembangunan wilayah harus sekecil mungkin untuk mengeksplorasi alam, namun tetap mampu menutupi kebutuhan secara merata. Sebagian besar wilayah penelitian memungkinkan untuk perkembangan permukiman, akibatnya terhadap kondisi di wilayah studi yaitu penggunaan lahan untuk tujuan permukiman tidak terkendali, terpencar dan tanpa perencanaan yang baik. Untuk itu maka perlu strategi tersebut guna memanfaatkan kondisi alam dengan baik.

### **Pengendalian kondisi budaya masyarakat**

Pertumbuhan penduduk karena pengaruh kondisi budaya masyarakat berkaitan dengan aktivitas dalam bermukim. Keadaam pemukiman akibat pengaruh budaya yaitu kecenderungan untuk mendirikan bangunan secara mandiri tanpa adanya perencanaan, terutama berhubungan dengan penambahan prasarana dasar. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas permukiman. Dengan adanya pembangunan rumah secara mandiri tanpa perencanaan dapat berpotensi menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh. Strategi pengendalian

yang perlu dilakukan yaitu pembinaan masyarakat berhubungan dengan budaya dalam bermukim dengan melakukan pendekatan tentang prasyarat pemukiman yang baik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisa AHP, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman di kecamatan Barru sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi, tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi atau mata pencaharian menjadi pemicu bertumbuhnya permukiman di wilayah penelitian, dan hal tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan permukiman.
2. Kondisi infrastruktur permukiman, infrastruktur di wilayah penelitian secara umum terpenuhi dengan baik, hal tersebut menjadi salah satu tarikan dalam pertumbuhan permukiman
3. Kondisi sosial, dimana pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya berdampak positif bagi perkembangan permukiman.
4. Kondisi alam, sebagian besar pengaruh pertumbuhan permukiman terhadap kondisi alam mengakibatkan pembukaan lahan yang tidak terkendali.
5. Kondisi perumahan, terdapat kesenjangan terhadap permukiman yang dibangun dan kelengkapan fasilitas yang ada antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
6. Kondisi budaya, kecenderungan masyarakat dalam membangun rumah yaitu berkelompok dengan keluarga serta pembangunan secara mandiri tanpa perencanaan infrastruktur yang baik.

Dari hasil penelitian, maka rekomendasi saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan, maka perlu peran serta dari semua pihak yang terlibat yaitu antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih aktif dalam melaksanakan kebijakan terkait perkembangan permukiman.
2. Perkembangan permukiman tidak hanya di wilayah penelitian dan tentunya akan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya, maka perlu rekomendasi studi lanjutan yang dapat dilakukan pada wilayah lain atau secara menyeluruh di Kabupaten Barru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, U. (2003). *Rencana Strategis Peningkatan Hunian Ruang Shofa Rumah Sakit Muhammadiyah lamongan (Pendekatan Field Force Analysis)*. Universitas Airlangga.
- Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. *Science*, 170, 393–404.
- Farizkha, I. A. (2016). *Pengendalian Perkembangan Permukiman Berbasis Sustainable Settlement Studi Kasus : Permukiman Perkotaan Kabupaten Lumajang*.
- Hairuddin, S. (2008). *Kajian Perkembangan Spasial Wilayah Pada Kawasan Pusat Pengembangan*. Semarang: Perpustakaan MPWK Undip.
- Karundeng, N. R., Poli, H., & Papia, F. J. . (2015). Pengaruh Pengembangan Perumahan Terencana Terhadap Perkembangan Wilayah Di Kecamatan Mapanget. *Spasial*, 2(3), 162–169.
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- Murdock Hernan. (2018). *Auditor Essentials: 100 Concepts, Tips, Tools, and Techniques for Success* (1st Editio). Retrieved from <https://doi.org/10.1201/9781315178141>
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031*. (n.d.).
- Permana, D. P., Suprayogi, A., & Prasetyo, Y. (2017). Identifikasi Kesesuaian Lahan untuk Relokasi Permukiman Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Geodesi Undip*, 6, 391–401.
- Pigawati, B., Yuliasuti, N., & Mardiansjah, F. H. (2017). Pembatasan Perkembangan Permukiman Kawasan Pinggiran Sebagai Upaya Pengendalian Perkembangan Kota Semarang. *Tataloka*, 19(4), 306. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.306-319>
- Rachman, H. F. (2010). *Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo*. 1–120.
- Siahaan, A., Nasution, Z., & Purwoko, A. (2014). Analisis Pengaruh Pembangunan Perumahan Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonom*, Vol. 17(No. 3), 103–110.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. (n.d.). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7).